

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR,
PERKEMBANGAN, HAMBATAN, DAN IMPLEMENTASI DI ERA MODERN**

Hafiz Hidayat¹, Mulya Safrina², Wendri Gusdi³, Febrio Rozalmi Putra⁴,
Yusparni Yetti⁵, Putri Yulia Mandasari⁶, Seri Sufani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Pendidikan Dasar S2, Universitas Adzkia

e-mail: hafizhidayat@adzkia.ac.id¹, mulyasyafrina1988@gmail.com²,
gusdiwendri@gmail.com³, febriorozalmiputra1350@gmail.com⁴,
yusparniyeti12@admin.sd.belajar.id⁵, putrimandasari488@gmail.com⁶,
seri.sufani30@guru.sd.belajar.id⁷

ABSTRACT

Primary education policy in Indonesia continues to shift in response to modernization, decentralization, and the need to improve learning quality. This literature review examines the development of basic education management policies, their implementation in schools, and the major obstacles encountered, including disparities in resources, weak governance, and limited teacher competencies. Findings show that although policy transformations have expanded school autonomy and improved curriculum standards, unequal implementation remains a critical challenge. This article concludes by offering recommendations to strengthen governance, increase teacher capacity, and improve policy alignment across government levels.

Keywords: basic education policy, school management, implementation barriers, decentralization.

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan modernisasi, desentralisasi pendidikan, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kajian literatur ini membahas perkembangan kebijakan, hambatan implementasi, serta pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar di sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan seperti otonomi sekolah, penyempurnaan kurikulum, serta penguatan manajemen berbasis sekolah telah membawa perubahan positif, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti kesenjangan sumber daya, lemahnya kapasitas tata kelola, serta kompetensi guru yang belum merata. Artikel ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat tata kelola sekolah, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memastikan sinkronisasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan dasar, manajemen sekolah, hambatan implementasi, desentralisasi.

A. Pendahuluan

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar memegang peranan penting dalam menentukan mutu layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Pendidikan dasar merupakan fondasi utama bagi perkembangan akademik dan karakter siswa sehingga kebijakan yang mengatur tata kelola sekolah harus dirancang dengan matang, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan global. Sejak era reformasi, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan, termasuk pemberian otonomi sekolah, perbaikan kurikulum, dan peningkatan profesionalisme guru.

Perkembangan kebijakan pendidikan dasar juga dipengaruhi oleh desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pengelolaan sekolah yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas daerah yang belum merata serta koordinasi yang belum optimal antara tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi turut menuntut perubahan signifikan dalam pengelolaan pendidikan dasar. Sekolah harus mampu menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan abad ke-21, sehingga kebijakan pendidikan tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga penguatan budaya digital, literasi, dan karakter peserta didik.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pengelolaan pendidikan dasar telah berubah, bagaimana

implementasinya di lapangan, serta hambatan apa saja yang masih dihadapi sekolah. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif terkait dinamika kebijakan pendidikan dasar dan arah perbaikan ke depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan merujuk pada buku, regulasi pemerintah, dan sumber ilmiah lain yang relevan. Menurut Sugiyono (2017), kajian literatur merupakan metode untuk mengumpulkan informasi teoritis serta temuan penelitian terdahulu guna membangun landasan teori yang kuat. Prosedur penelitian dilakukan dengan menyeleksi literatur yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar, desentralisasi pendidikan, serta implementasinya di satuan pendidikan.

Pendekatan kajian literatur dalam penelitian ini juga diperkaya dengan konsep *realist synthesis* dari Pawson (2006), yang memfokuskan analisis pada hubungan *context-mechanism-outcome (CMO)*. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya merangkum kebijakan, tetapi juga menelaah konteks yang memengaruhi pelaksanaannya, mekanisme yang berjalan di sekolah, serta hasil yang dicapai.

Literatur yang digunakan mencakup sumber nasional dan internasional yang relevan, termasuk buku manajemen pendidikan, regulasi Kemendikbud, serta teori tata kelola pendidikan. Hasil sintesis literatur ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan kebijakan, hambatan implementasi, dan rekomendasi penguatan pengelolaan pendidikan dasar.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Perkembangan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional, perubahan sosial budaya, serta tuntutan peningkatan kualitas pendidikan yang semakin kompleks. Sejak masa reformasi, pemerintah berupaya melakukan transformasi pengelolaan pendidikan agar lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada mutu. Arikunto (2013) menegaskan bahwa perubahan kebijakan pendidikan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga kebijakan harus bersifat adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

Salah satu tonggak perubahan kebijakan penting adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kebijakan ini menempatkan sekolah sebagai unit utama pengambil keputusan, dengan memberikan keleluasaan dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pengembangan program sekolah. MBS bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan melalui partisipasi aktif guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Dengan adanya otonomi sekolah, setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik.

Selain perubahan tata kelola, reformasi kurikulum juga menjadi agenda besar pemerintah. Perubahan kurikulum dari KTSP menuju Kurikulum 2013, hingga kini Kurikulum Merdeka, mencerminkan upaya pemerintah menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan mendorong penguatan kompetensi.

Kurikulum Merdeka misalnya, memberi ruang fleksibilitas bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai minat, kemampuan, dan perkembangan siswa. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia semakin menekankan pembelajaran diferensiatif sebagai respon kebutuhan abad ke-21.

Di samping itu, peningkatan kompetensi guru menjadi fokus kebijakan dalam dua dekade terakhir. Program sertifikasi guru dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang untuk memastikan pendidik memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai. Guru dipandang sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga peningkatan kualitas mereka menjadi prioritas nasional. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap adanya kesetaraan mutu pendidik di seluruh Indonesia, baik di daerah maju maupun tertinggal.

Langkah transformasi kebijakan juga terlihat pada proses digitalisasi layanan pendidikan. Pemerintah mengembangkan berbagai platform digital seperti Dapodik, Rapor Pendidikan, Merdeka Mengajar, dan platform belajar daring lainnya sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan pendidikan dasar. Digitalisasi tidak hanya mempermudah administrasi dan pendataan pendidikan, tetapi juga mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik, interaktif, dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

Secara keseluruhan, rangkaian perkembangan kebijakan tersebut menunjukkan adanya arah perubahan menuju pendidikan yang lebih otonom, fleksibel, dan berbasis

kebutuhan peserta didik. Transformasi ini menjadi fondasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Kebijakan di Satuan Pendidikan

Pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai unsur yang saling berinteraksi, yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran strategis yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer sekaligus pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab mengarahkan sekolah agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat diterapkan secara efektif. Guru menjadi pelaksana utama di lapangan yang menerjemahkan kebijakan kurikulum, asesmen, dan pembelajaran ke dalam praktik konkret di kelas. Sementara itu, komite sekolah dan masyarakat berperan sebagai mitra dalam menyediakan dukungan moral, finansial, dan sosial untuk memperkuat berbagai program sekolah.

Menurut Mulyasa (2017), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas sekolah dalam mengelola perubahan. Kapasitas ini mencakup kemampuan kepala sekolah dalam manajemen, kompetensi guru, ketersediaan sarana-prasarana, serta dukungan lingkungan sosial. Salah satu contoh kebijakan yang menuntut kapasitas manajerial yang kuat adalah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS, sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun perencanaan, mengatur anggaran, serta mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi bagian integral MBS sehingga menjadikan sekolah sebagai institusi yang partisipatif dan responsif terhadap kondisi lingkungan.

Pada aspek pembelajaran, kebijakan Kurikulum Merdeka memberi ruang fleksibilitas yang lebih luas bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran. Guru tidak lagi terikat secara ketat oleh struktur kurikulum yang kaku, melainkan diberi kesempatan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Fleksibilitas ini memungkinkan inovasi proses belajar, penggunaan proyek nyata, serta pendekatan yang berpusat pada siswa. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka sangat menuntut kreativitas dan kompetensi profesional guru.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan yang cukup signifikan. Implementasi kebijakan tidak selalu seragam antara sekolah yang memiliki sumber daya melimpah dan sekolah yang menghadapi keterbatasan sarana-prasarana dan tenaga pendidik. Sekolah di perkotaan cenderung lebih siap menerapkan kebijakan baru karena memiliki akses teknologi, kualitas SDM yang lebih baik, serta dukungan dana yang memadai. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil sering kesulitan mengakses pelatihan, kekurangan guru kompeten, dan tidak memiliki fasilitas yang mendukung. Kondisi ini membuat pelaksanaan kebijakan

berjalan timpang dan tidak menghasilkan dampak yang konsisten di seluruh wilayah.

Perbedaan kesiapan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan berkelanjutan, pemerataan sumber daya, dan penguatan kapasitas sekolah agar implementasi kebijakan pendidikan dasar dapat berjalan efektif, merata, dan berkeadilan.

Hambatan Pelaksanaan Kebijakan

1. Kesenjangan Sumber Daya

Kesenjangan sumber daya merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar, terutama antara sekolah perkotaan dan sekolah di daerah terpencil. Banyak sekolah di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) menghadapi keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, hingga sanitasi sekolah. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap keterlaksanaan kebijakan seperti implementasi Kurikulum Merdeka yang memerlukan ruang pembelajaran kreatif dan sarana pendukung.

Selain itu, kekurangan tenaga pendidik yang berkualifikasi juga menjadi masalah serius. Banyak sekolah di daerah terpencil hanya memiliki beberapa guru untuk mengajar berbagai mata pelajaran, bahkan ada yang masih mengandalkan guru honorer dengan kompetensi terbatas.

Dukungan teknologi seperti internet, perangkat TIK, atau listrik stabil pun belum merata, sehingga digitalisasi pendidikan yang

dicanangkan pemerintah sulit diimplementasikan secara optimal.

Ketimpangan sumber daya ini menyebabkan hasil implementasi kebijakan tidak seragam dan memperluas gap mutu pendidikan antar daerah.

2. Kapasitas manajerial yang belum merata

Menurut Sudjana (2019), kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai manajer pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, pengembangan program sekolah, serta hubungan dengan masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut.

Banyak kepala sekolah belum terlatih dalam perencanaan strategis, manajemen perubahan, supervisi akademik, ataupun pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Ketika sekolah diberi otonomi seperti dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kapasitas manajemen kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kapasitas yang lemah dapat berdampak pada perencanaan sekolah yang tidak efektif, penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran, minimnya inovasi, dan lemahnya budaya mutu di lingkungan sekolah.

Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal meskipun kerangka kebijakan pemerintah sudah jelas.

3. Kendala pemahaman kebijakan

Hambatan lain yang sering muncul adalah kesalahan interpretasi terhadap kebijakan baru. Ketika pemerintah meluncurkan kurikulum, sistem asesmen, atau program baru,

tidak semua guru dan tenaga kependidikan memahami substansi kebijakan tersebut secara utuh.

Banyak guru hanya menerima sosialisasi secara singkat tanpa pendampingan mendalam, sehingga pemahaman terhadap tujuan, prinsip, dan langkah implementasi kebijakan menjadi tidak maksimal. Misalnya, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, beberapa guru masih menganggap pembelajaran berdiferensiasi hanya sekedar membuat media berbeda untuk siswa tertentu, padahal konsep tersebut mencakup perbedaan tujuan, proses, dan produk belajar.

Salah tafsir kebijakan mengakibatkan implementasi di kelas tidak sesuai dengan esensi kebijakan, sehingga efektivitasnya menurun. Kurangnya pelatihan, pendampingan profesional, serta minimnya budaya diskusi kebijakan menjadi faktor utama munculnya hambatan ini.

4. Koordinasi antar jenjang pemerintahan

Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah juga menjadi tantangan besar dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Meskipun kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat, implementasi teknisnya sering diatur oleh pemerintah daerah sehingga perbedaan penafsiran atau perbedaan prioritas anggaran dapat menimbulkan ketidaksinkronan. Misalnya, ketika pusat menetapkan program digitalisasi sekolah, tidak semua pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung perangkat TIK.

Selain itu, regulasi turunan yang tidak seragam dapat membingungkan sekolah. Perbedaan persepsi antar jenjang pemerintah terkadang

membuat sekolah menerima instruksi yang tumpang tindih, lambat, atau tidak jelas.

Akibatnya, implementasi kebijakan menjadi terhambat, terfragmentasi, dan kurang efektif. Koordinasi yang lemah juga dapat menghambat monitoring dan evaluasi program, sehingga identifikasi masalah di lapangan tidak cepat tertangani.

Peran Guru dalam Implementasi Kebijakan

Pendidikan holistik juga menumbuhkan nilai spiritual yang universal seperti syukur, rendah hati, dan makna hidup. Aspek spiritual memperkuat identitas moral siswa.

Guru merupakan pelaksana utama kebijakan pendidikan di ruang kelas dan menjadi aktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi berbagai program pemerintah. Djamarah (2010) menegaskan bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan kurikulum yang bertanggung jawab memastikan setiap aturan, prinsip, dan tujuan kurikulum diwujudkan dalam praktik pembelajaran nyata. Dengan demikian, guru memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pada tingkat makro dengan pelaksanaannya pada tingkat mikro di kelas.

Salah satu peran vital guru adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara seragam karena setiap peserta didik memiliki kemampuan, gaya belajar, minat, dan latar belakang yang berbeda. Guru dituntut mampu melakukan diferensiasi pembelajaran, baik melalui penyesuaian proses, konten,

maupun produk belajar. Hal ini penting agar kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan dan kualitas benar-benar berdampak pada semua siswa tanpa terkecuali.

Guru juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan media pembelajaran. Media menjadi sarana penting untuk mengefektifkan penyampaian materi, meningkatkan motivasi belajar, dan memperkuat pemahaman siswa. Dalam konteks kebijakan modern yang mendorong digitalisasi, guru harus mampu memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif, perangkat TIK, maupun media sederhana yang dirancang sendiri. Kemampuan mengembangkan media pembelajaran mencerminkan kreativitas dan kompetensi profesional guru dalam mendukung implementasi kebijakan kurikulum yang menekankan pembelajaran aktif dan kontekstual.

Selain itu, guru berperan dalam mengimplementasikan asesmen secara tepat. Kebijakan pendidikan saat ini menekankan penggunaan asesmen formatif, diagnostik, dan sumatif sebagai dasar evaluasi capaian belajar siswa. Guru harus mampu merancang instrumen asesmen yang valid, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menggunakan data asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Implementasi asesmen ini sangat penting karena menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum di kelas.

Tidak kalah penting, guru bertugas membangun lingkungan belajar yang positif, yaitu lingkungan yang aman, inklusif, suportif, dan mendorong interaksi yang sehat antar siswa. Lingkungan belajar yang kondusif berpengaruh langsung terhadap motivasi, keterlibatan, dan

prestasi siswa. Guru yang berhasil membangun iklim kelas yang positif memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal pembentukan karakter dan soft skills.

Contoh nyata tuntutan peran guru terlihat pada implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menuntut guru untuk lebih kreatif dalam merancang pengalaman belajar, reflektif dalam mengevaluasi efektivitas strategi pengajaran, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Guru harus mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), serta memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari inovasi proses belajar. Dengan demikian, keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada tingkat kesiapan, kompetensi, dan inovasi guru di kelas.

Secara keseluruhan, guru bukan hanya pelaksana teknis, tetapi merupakan agen perubahan yang menentukan arah keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar. Peningkatan kualitas guru menjadi syarat mutlak untuk memastikan kebijakan yang baik dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi peserta didik.

Tantangan Digitalisasi dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar

Era digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sekolah dasar. Perkembangan teknologi informasi membuka akses terhadap sumber belajar yang lebih luas, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, serta meningkatkan efisiensi administrasi sekolah. Namun, transformasi digital ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa

kemampuan literasi digital yang memadai. Yusri (2020) menegaskan bahwa literasi digital menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki baik oleh guru maupun siswa agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi pendidikan adalah kesenjangan akses internet. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas internet yang memadai sehingga mampu memanfaatkan pembelajaran daring dan platform digital dengan lebih optimal. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah terpencil atau pedalaman masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, bahkan beberapa belum memiliki akses listrik yang stabil. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan tidak berjalan merata dan berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Keterbatasan akses ini juga membuat siswa di daerah terpencil tidak memperoleh pengalaman belajar digital yang sebanding dengan siswa di wilayah maju.

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah rendahnya kemampuan teknologi guru. Banyak guru masih belum terbiasa menggunakan perangkat digital seperti komputer, aplikasi pembelajaran, atau platform manajemen kelas. Guru yang tidak memiliki kompetensi teknologi memadai sering mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran berbasis digital, mengelola kelas virtual, atau melakukan asesmen secara daring. Rendahnya literasi digital guru sering menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum dan kebijakan modern yang memerlukan

pemanfaatan teknologi, seperti Kurikulum Merdeka yang menyediakan platform "Merdeka Mengajar" sebagai sumber belajar dan manajemen pembelajaran. Tanpa peningkatan kompetensi teknologi, guru sulit memaksimalkan potensi digitalisasi pendidikan.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran. Meskipun banyak sekolah telah memiliki akses pada platform seperti Google Classroom, Akun Belajar.id, Merdeka Mengajar, atau Learning Management System lainnya, tetapi penggunaannya belum diarahkan pada pembelajaran yang bermakna. Banyak guru hanya memanfaatkan platform tersebut untuk mengunggah tugas atau materi, tanpa memanfaatkannya untuk memperkaya pengalaman belajar seperti memberikan umpan balik, menyediakan sumber interaktif, atau memfasilitasi kolaborasi. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya diintegrasikan dalam pedagogi, tetapi masih sekadar sebagai alat tambahan.

Namun demikian, digitalisasi tetap memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan, administrasi, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Sistem digital seperti Dapodik, Rapor Pendidikan, dan platform evaluasi pembelajaran memungkinkan pemerintah memantau perkembangan sekolah secara lebih akurat dan cepat. Administrasi sekolah menjadi lebih efisien karena berbagai laporan dapat dilakukan secara daring. Selain itu, teknologi membuka peluang bagi guru untuk mengakses pelatihan, sumber belajar, dan komunitas profesional yang dapat meningkatkan kompetensi mereka.

Dengan demikian, era digital dapat menjadi pendorong kuat peningkatan mutu pendidikan dasar jika didukung oleh pemerataan akses, peningkatan literasi digital guru dan siswa, serta integrasi teknologi yang tepat dalam proses pembelajaran. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan digitalisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sinergi Sekolah, Pemerintah, dan Masyarakat

Pengelolaan pendidikan dasar tidak dapat berjalan secara efektif apabila hanya mengandalkan peran sekolah semata. Pendidikan dasar merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak, sehingga kolaborasi menjadi elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Uno (2012) menegaskan bahwa dukungan orang tua dan komite sekolah memiliki peranan strategis dalam memastikan proses pendidikan berjalan sesuai tujuan. Peran mereka tidak hanya sebatas pendampingan anak di rumah, tetapi juga menyangkut kontribusi dalam pengelolaan sekolah, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan program. Dengan demikian, sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi fondasi terbentuknya manajemen pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dari kolaborasi ini adalah penggalangan sumber daya. Banyak sekolah, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan anggaran, memerlukan dukungan dari masyarakat dan komite sekolah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Kolaborasi

dengan orang tua dapat membantu penyediaan fasilitas pembelajaran, perbaikan infrastruktur ringan, hingga dukungan logistik untuk kegiatan sekolah. Komite sekolah sebagai representasi masyarakat sering berperan dalam mobilisasi sumber daya lokal, baik berupa tenaga, dana, maupun fasilitas. Melalui sinergi ini, sekolah dapat mengatasi sebagian hambatan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks keterbatasan dana operasional atau kebutuhan mendesak lainnya.

Aspek kedua yang tidak kalah penting adalah pengawasan program sekolah. Komite sekolah memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan kebijakan sekolah berjalan transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme pengawasan partisipatif, masyarakat dapat memantau apakah kebijakan pendidikan seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Merdeka, dan berbagai program pemerintah lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengawasan yang kuat dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi program, dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pendidikan yang baik (*good governance*) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Sinergi sekolah-orang tua-masyarakat juga berperan dalam pembentukan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Lingkungan belajar yang positif tidak hanya diciptakan di dalam kelas, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan harmonis antara sekolah dan keluarga. Orang tua yang aktif terlibat dalam kegiatan sekolah dapat membantu menciptakan budaya disiplin, komunikasi yang baik, dan rasa

tanggung jawab bersama terhadap perkembangan anak. Lingkungan yang aman dan penuh dukungan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kenyamanan siswa dalam belajar. Dalam konteks pendidikan karakter dan kesejahteraan psikologis anak, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting yang memperkuat upaya sekolah dalam membangun iklim belajar yang sehat dan inklusif.

Secara keseluruhan, kolaborasi dalam pengelolaan pendidikan dasar bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Ketika sekolah, orang tua, komite, dan masyarakat bekerja secara sinergis, maka berbagai hambatan implementasi kebijakan dapat diminimalkan, mutu pembelajaran meningkat, dan tujuan pendidikan dasar dapat tercapai secara lebih optimal.

Arah Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dasar

Arah kebijakan pendidikan dasar di masa depan menunjukkan kecenderungan kuat menuju penguatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu proyeksi penting adalah penguatan otonomi sekolah, yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan. Dengan otonomi yang lebih besar, sekolah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan program, mengelola anggaran, serta menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Otonomi ini memungkinkan sekolah lebih responsif terhadap karakteristik peserta didik dan dinamika masyarakat sekitar. Kebijakan otonomi sekolah juga selaras dengan prinsip *school-based management*

yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan masa depan diprediksi akan semakin memperluas kewenangan sekolah, termasuk dalam inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, hingga pengembangan budaya sekolah.

Selain itu, pemerintah terus mengarahkan kebijakan pendidikan pada pemerataan kualitas guru. Guru merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan kebijakan di kelas, sehingga kesenjangan kualitas guru antar wilayah menjadi tantangan serius yang harus diatasi. Upaya pemerataan kualitas guru diproyeksikan melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan berkelanjutan, skema peningkatan karier yang berbasis kompetensi, serta sistem distribusi guru yang lebih merata. Dengan adanya pemerataan ini, sekolah-sekolah di daerah terpencil atau tertinggal dapat memperoleh pendidik yang memiliki kompetensi setara dengan guru di wilayah maju. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali.

Kebijakan masa depan juga diarahkan pada peningkatan digitalisasi pendidikan. Transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, tetapi kebutuhan untuk memperluas akses belajar, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menyediakan data pendidikan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Penggunaan platform seperti Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, dan berbagai Learning Management System (LMS) akan semakin diperkuat. Digitalisasi juga mencakup pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran, evaluasi, dan komunikasi antara

sekolah dan orang tua. Dengan infrastruktur yang memadai dan peningkatan literasi digital, digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperluas kesempatan belajar bagi siswa di seluruh Indonesia.

Kecenderungan lain yang sangat menonjol adalah penguatan pembelajaran yang humanis dan berpusat pada siswa. Dalam paradigma pendidikan modern, peserta didik dipandang sebagai individu unik dengan potensi, minat, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Kebijakan pendidikan dasar masa depan akan semakin menekankan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, serta penciptaan pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan mendorong kemandirian siswa. Pembelajaran yang humanis tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga pada perkembangan karakter, empati, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum Merdeka menjadi salah satu bukti arah kebijakan ini, dan proyeksinya akan terus menguat seiring meningkatnya kebutuhan siswa menghadapi tantangan global.

Selain itu, penguatan asesmen formatif diprediksi menjadi salah satu fokus utama kebijakan pendidikan dasar ke depan. Asesmen formatif berfungsi sebagai alat untuk memahami perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan, bukan sekadar alat pengukur hasil akhir. Dengan asesmen formatif, guru dapat memberikan umpan balik yang tepat waktu, memfasilitasi perbaikan proses belajar, serta menyesuaikan pembelajaran agar sesuai kebutuhan siswa. Pendekatan asesmen ini sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan evaluasi yang lebih humanis, tidak

menghakimi, dan mendukung perkembangan kompetensi siswa secara utuh.

Jika arah kebijakan masa depan tersebut berhasil diwujudkan secara konsisten dan merata, maka kualitas pendidikan dasar Indonesia berpotensi meningkat secara signifikan. Sekolah akan semakin mandiri dan inovatif, guru akan lebih profesional dan merata kompetensinya, pembelajaran menjadi lebih relevan dan berorientasi pada kebutuhan siswa, dan teknologi akan semakin memperkuat efisiensi serta mutu layanan pendidikan. Hal ini akan mendorong terciptanya generasi yang lebih cerdas, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

D. Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia terus mengalami transformasi seiring perkembangan zaman, dinamika sosial-politik, dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Berbagai kebijakan seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), perubahan kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta digitalisasi pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang lebih otonom, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Perubahan ini menandai upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan dasar sebagai fondasi pembentukan karakter dan kompetensi generasi masa depan.

Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Kesenjangan sumber daya, kapasitas manajerial kepala sekolah yang belum merata, rendahnya pemahaman

terhadap kebijakan baru, serta koordinasi yang kurang efektif antar jenjang pemerintahan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Guru sebagai pelaksana utama kebijakan juga dituntut memiliki kreativitas, kemampuan reflektif, dan kompetensi teknologi yang memadai, terutama dalam menghadapi tuntutan Kurikulum Merdeka dan era digital. Keterlibatan masyarakat, komite sekolah, dan orang tua semakin penting untuk memperkuat pengawasan, penggalangan sumber daya, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Melihat arah kebijakan pendidikan ke depan yang menekankan otonomi sekolah, pemerataan kualitas guru, digitalisasi, pembelajaran humanis, serta asesmen formatif, terdapat potensi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar secara signifikan. Keberhasilan pencapaian arah kebijakan ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Jika kolaborasi dan pemerataan dukungan dapat diwujudkan secara konsisten, pendidikan dasar Indonesia berpeluang menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global dengan kompetensi dan karakter yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, R. I. (2012). *Learning to Teach*. New York: McGraw-Hill.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Borich, G. (2016). *Effective Teaching Methods: Research-Based Practice*. Pearson Education.
- Djamarah, S. B. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goleman, D. (2006). *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*. New York: Bantam Books.
- Hargie, O. (2011). *Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice*. London: Routledge.
- Mehrabian, A. (2007). *Nonverbal Communication*. New Brunswick: Aldine Transaction.
- Mulyasa, E. (2017). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pawson, R. (2006). *Evidence-Based Policy: A Realist Perspective*. London: SAGE Publications.
- Sudjana, N. (2019). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Uno, H. B. (2012). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusri, M. (2020). *Literasi Digital dalam Pembelajaran Abad 21*. Jakarta: Rajawali Pers.